

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press.
- Attamimi, Hamid.S., 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Depok: Universitas Indonesia.
- Dicey, A.V., 1952, *Introduction to the study of law of the constitution*, London: Macmillan and Co.Limited.
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Falakh, M. Fajrul (Penyunting), 2008, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Herbert Hausmaninger, 2003, *The Austrian Legal System*, 3rd edition, Manzche Verlags und Universitatsbuchhandlung, Viena, Austria.
- Ibrahim, Johnny., 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans, 1949, *General Theory of Law and State*, Translate by Anders Wedberg, Cambridge Massachusetss: Harvard University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

- Mertokusumo, Soedikno., 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.
- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Najah, M., 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- National Court Administration, 2019, *Booklet 2019 Introductory Book of the Supreme Court of Korea*, Supreme Court of Korea, Seoul, Republic of Korea
- Rahardjo, Satjipto., 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Ranggawidjaja, H. Rosjidi., 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Schroeder, Ricard C., 2000, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat, US: Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat*.
- Siahaan, Maruarar., 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sejarah, Realita, dan Dinamika*, Setjen MPR RI, Jakarta.
- Soemantri, Sri., 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , Mamudji, Sri., 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tabusassa T, Andi Sandi A, US Supreme Court., 2003, *Document For Research Information: Federal & State Cases Combined Marbury and Madison, Supreme Court of The United States, 5 U.S. 137*

(United States Reports/Official record); 2 L. Ed. 60; 1803, U.S. LEXIS 352; 1 Cranch 137, Supreme Court of US, Washington, US

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Revisi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Revisi *Buku I (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Revisi *Buku II (Sendi-Sendi Fundamental Negara)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

The Federal Judicial Center, 2014, *The United Legal System: A Short Description*, FJC, Supreme Court of US, Washington DC, US.

-----, 2020, *Marbury v. Madison: Cases that Shaped the Federal Courts*, FJC, Washington DC, US.

U.S. Supreme Court, 2019, *Rules of The Supreme Court of The United States*, Department of Justice, Pennsylvania, Washington DC, US,

Vile. John R, 2010, *Essential Supreme Court Decision: Summaries of Leading Cases in US. Constitutional Law 15th ed.*, Maryland: Rowman & Littlefiled Publishing, US.

Wojowasito, S., 1985, *Kamus umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Yang, Hyunah., 2013, *Law and Society in Korea*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd, US.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden RIS 31 Djan. 1950 Nr.48.cLN 50-3, du. 6 Peb.'50,
tentang Konstitusi RIS/UUD RIS

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan, ditetapkan pada 18 Agustus 2000.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan
Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Serikat 9 Mei 1950)

Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi UUDS RI
(Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950
yang telah dicetak ulang)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1970)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5234)

U.S. Constitution, Senate Publication Edition with brief explanations, Office of Secretary of The Senate with The Assistance of Johnny H. Killian of The Library Congress.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

A. SKRIPSI/PENELITIAN/JURNAL

Aziz, Machmud., 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

A.T., Phillip, 1999, *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court System*, Seattle University Law Review Vol.22, US.

Burkell, Jacquelyn dan Jane Bailey., 2017, *Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning Presumptive Public Access to Parties' and Witnesses Personal Information*, Canada: Western University FIMS Publications.

- D, Wicaksana., 2014, *Mengapa Penerapan Judicial Restraint di MK*, Jurnal Konstitusi Vol.11, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Ginsburg, Tom., 2009, *7-Rule by Law or Rule of Law? The Constitutional Court of Korea*, Cambridge University Press, UK.
- Hartono, Dwi Luthfi., 2018, *Disparitas Karakteristik Putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan (Regeling)*, Skripsi, Yogyakarta: S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Haryono R, 2012, *Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada Tahun 1950*, Jurnal Ilmu Humaniora Vol.12 Nomor 2, UNAIR, Surabaya.
- Inonsentius, 2009, *Pengkajian Hukum Tentang Putusan MK*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kelly, John.M., 1964, *Audi Alteram Partem:Note*, Paper, US: Notre Dame Law School.
- Kwon, Youngjoon., 2007, *Litigating in Korea: A General Overview of the Korean Civil Procedure*, Journal of Korean Law, Seoul National University Law Research Institute, South Korea.
- Manan, Bagir., 1994, *Ketentian-ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum nasional*, Makalah, Jakarta.
- MD, Mahfud., 2009, *Konstitusi Negara*, Makalah, Jakarta.
- Muhammad, Pan., 2016, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol.13, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Noor, M.Aziz, 2010, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Kemenkumham RI, Indonesia.
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam, 2019, *Open Legal Policy dalam Putusan MK dan Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol.16, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Shauer, Frederick F., 1976, *English Natural Justice and American Due Process: An Analytical Comparison*, Virginia US: 18 Wiliam.& Mary Law School.

Siahaan, Maruar., 2010, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi Nomor 4 Agustus 2010, Mahkamah Konstitusi.

Syahuri *et al*, 2014, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Laporan Pengkajian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Wibowo, Mardian., 2015, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol.12, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Widiastuti, Fransisca., 2006, *Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang oleh Mahkamah Agung*, Tesis, Yogyakarta: S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertanggal 31 Mei 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertanggal 20 Maret 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tertanggal 24 Januari 2019.

Putusan MK Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 14 ayat (2). Tertanggal 14 September 2009.

D. LAIN-LAIN

Ensiklopedia Britanica, *The Ombudsman*,
<https://www.britannica.com/topic/administrative-law/The-ombudsman#ref417497> diakses pada tanggal 22 Maret 2019

Chapter III article 26-36, Constitutional Court Act,
http://ri.ccourt.go.kr/eng/ccourt/files/docs/news/The_Constitutional_Court_Act.pdf, diakses pada 22 Mei 2020.

Functions Supreme Court of Korea,
<https://eng.scourt.go.kr/eng/supreme/about/function.jsp>, diakses pada tanggal 22 November 2020.

International Covenant on Civil and Political Rights,
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>, diakses pada 6 Juni 2020

Legislative System, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do, diakses pada tanggal 23 November 2020

Putusan Putus Per-Tahun Mahkamah Agung Hak Uji Materiil,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/hak-uji-materiil-1.html>, diakses pada 22 November 2020.

Review of Constitutionality of Law,
https://jifi.scourt.go.kr/foreigner/en/html/judiciary/activities/trials_othertab01.html, diakses pada 22 November 2020.

Supreme Court Procedure, <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>, diakses pada 10 Juli 2020.

Redaksi Majalah Mahkamah Konstitusi, 2014, *Konstitusi No.90 Agustus 2014*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.